KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 21 /PANSEL.KOMINFO/KP.03.01/08/2020

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diseleksi

No.	Nama Jabatan	Eselon
1.	Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	II.a
2.	Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	II.a
3.	Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	II.a

(Standar Kompetensi Jabatan terlampir)

B. Deskripsi Jabatan

1). Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat dan sistem telekomunikasi radio, pos, telekomunikasi nonradio, dan teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat

pos, telekomunikasi dan informatika, serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standar teknis dan standardisasi perangkat dan sistem telekomunikasi radio, pos, telekomunikasi nonradio, dan teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika, serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar teknis dan standardisasi telekomunikasi radio, standar pos dan telekomunikasi nonradio, standardisasi teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika, serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat.

2). Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum dan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, serta sarana dan prasarana sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum dan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, serta sarana dan prasarana sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;

d. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan informatika;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, serta perangkat pos dan informatika.

3). Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

a. pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
b. pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
c. pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, electromagnetic compatibility (EMC) dan kalibrasi.

C. Persyaratan Umum

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Tidak pernah berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (dari Inspektorat Jenderal Kementerian / Lembaga terkait);
4. Telah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat (Menteri/Kepala LPNK) dan Instansi Daerah (Kepala Daerah). Dibuktikan dengan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan izin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana/ Diploma IV dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakeditasi atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan

Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;

8. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b atau Jenjang Ahli Madya untuk Jabatan Fungsional;
9. Diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan/ atau bentuk pendidikan lain yang setara;
10. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019);
11. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
12. Telah menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi yang diwajibkan dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahun 2019.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) jabatan dengan menyebutkan jabatan yang dilamar pada Surat Lamaran;
2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas **ASLI** yang discan dengan format .pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dengan nama file: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_RIO);
3. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring mulai tanggal 18 Agustus – 1 September 2020 melalui laman http://seleksi.kominfo.go.id, dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:
   1) Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika;
   2) Soft file pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
   3) Daftar Riwayat Hidup;
   4) Kartu Tanda Penduduk;
   5) Ijazah terakhir;
   6) Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
   7) Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;

8) Sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (apabila ada);
9) Sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi (apabila ada);
10) Penilaian Prestasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
11) Tanda bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi yang diwajibkan Tahun 2019;
12) Tanda bukti penyerahan SPT Tahun 2019;
13) Pakta Integritas;
14) Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memberikan izin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo;
15) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga terkait;
16) Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang menyatakan bahwa pendaftar:
    a. bersedia dilakukan Klarifikasi Rekam Jejak;
    b. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
    c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (PyB);
    d. menyatakan kebenaran dan keabsahan data;

4. Berkas yang kurang dan tidak lengkap dianggap gugur.

III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	18 Agustus – 1 September 2020
2.	Penerimaan berkas lamaran	18 Agustus – 1 September 2020
3.	Seleksi Administrasi	2 – 5 September 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	9 September 2020

5.	Pelaksanaan Tes Penulisan Makalah dan Assessment Test	16 – 18 September 2020
6.	Pengumuman Hasil Assessment Test	28 September 2020
7.	Pelaksanaan Tes Wawancara (Online)	6 Oktober 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi 3 (tiga) besar	3 November 2020

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman https://seleksi.kominfo.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia;
6. Keputusan Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama di alamat email: pansel@kominfo.go.id.

Jakarta, 14 Agustus 2020
Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama,

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rosarita Niken Widiastuti